

TESIS

URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

ARIEF GASTRI TJAHJONO

NPM: 24310023

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2025**

TESIS

**URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK
DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
YANG INDEPENDEN**



Oleh :

ARIEF GASTRI TJAHJONO

NPM: 24310023

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2025

T E S I S
URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK
DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
YANG INDEPENDEN

Diajukan oleh :

ARIEF GASTRI TJAHJONO
NPM: 24310023

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal

Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.



Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

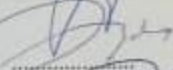
TESIS

URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ARIEF GASTRI TJAHJONO
NPM: 24310023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 10 Juli 2025

Nama Penguji	Susunan Dewan Penguji	Tanda tangan
Dr.DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 17 Juli 2025
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister


Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

T E S I S
URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK
DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
YANG INDEPENDEN

Diajukan oleh :

ARIEF GASTRI TIAHJONO
NPM: 24310023

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 08 Juli 2025

Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

T E S I S
URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK
DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
YANG INDEPENDEN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ARIEF GASTRI TJAHJONO
NPM: 24310023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 10 Juli 2025

Susunan Dewan Penguji		Tanda tangan
Nama Penguji		
Dr.DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 17 Juli 2025
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister

Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta para sahabat dan umatnya. Dengan ini penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Urgensi Kedudukan Hukum Pengadilan Pajak Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Yang Independen" sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Pada Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca Tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

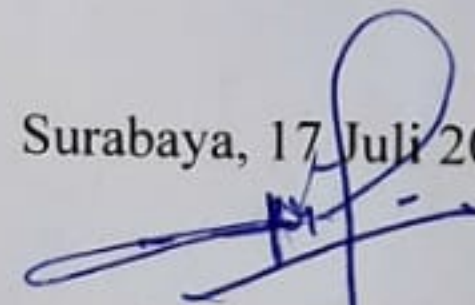
1. Kepada kedua orangtua, Ayah: Gasmadji (Alm.) dan Ibu: Ponitri, yang telah memberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan hukum dan do'a yang tulus.
2. Isteri-ku (Hastini Ipriningtyas) serta anak-anakku: Ovi Prina Gastriani dan Okky Gastri Kusumaningtyas, yang telah memberikan do'a semangat dan dukungan demi lancar dan selesainya studi dan kesabaran yang tulus.
3. Prof. Dr. H. Widodo Ario Koentjono, dr.Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Onk(K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,

dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.

6. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Teman-teman mahasiswa RPL S2 FH UWKS Surabaya Angkatan Tahun 2024, yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna di dalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin

Surabaya, 17 Juli 2025



Arief Gastri Tjahjono
NPM : 24310023

dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.

6. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Teman-teman mahasiswa RPL S2 FH UWK Surabaya Angkatan Tahun 2024, yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna di dalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin

Surabaya, 17 Juli 2025

Arief Gastri Tjahjono
NPM : 24310023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIEF GASTRI TJAHJONO

NPM : 24310023

Alamat : Prambanan Lidah Kulon IV/AD-21 RT. 001 RW. 009
Kel. Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Kota Surabaya

No. Telp (HP) : 081330208889

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: "URGENSI KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 26 Juli 2024



ARIEF GASTRI TJAHJONO

NPM : 24310023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIEF GASTRI TJAHJONO

NPM : 24310023

Alamat : Prambanan Lidah Kulon IV/AD-21 RT. 001 RW. 009
Kel. Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Kota Surabaya

No. Telp (HP) : 081330208889

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: “URGensi KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 26 Juli 2024

Yang Menyatakan,

ARIEF GASTRI TJAHJONO

NPM : 24310023

ABSTRACT

The independent judiciary is characterized by freedom and autonomy. Article 24(2) of the 1945 Constitution stipulates that judicial power is exercised by the Supreme Court and the courts under its supervision, namely the general courts, religious courts, military tribunals, administrative courts, and the Constitutional Court. Under Article 1(8) of Act No. 48 of 2009 concerning judicial power, a special court is defined as a court empowered to examine, adjudicate, and render decisions in particular cases, and may only be established within one of the judicial bodies under the Supreme Court as prescribed by statute. Consequently, no special court may be constituted outside the Supreme Court's judicial hierarchy.

Nevertheless, the Tax Court, as regulated by Act No. 14 of 2002 on the Tax Court, remains subject to the dual authority of both the Supreme Court and the Ministry of Finance. Such dual subordination has the potential to compromise judicial independence in the resolution of tax disputes. This study investigates the distinctive characteristics of the Tax Court as a special court within an independent judicial system and explores the urgency of clarifying its legal status in that system.

Employing a normative juridical methodology with a statutory approach and drawing on both primary and secondary legal sources, the research concludes that the Tax Court, as a special court, exhibits significantly different features compared to other judicial bodies. It is therefore recommended that the Tax Court be integrated into the administrative court environment under a single supervisory roof of the Supreme Court.

Keywords: *Tax Court; Judicial Power; Independence*

ABSTRAK

Kekuasaan Kehakiman yang independen adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak dimungkinkannya terdapat lembaga peradilan khusus yang dibentuk tidak berada dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi terdapat suatu lembaga peradilan yaitu pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang sampai saat ini masih dibawah dua atap yaitu Mahkamah Agung dan Kementrian Keuangan. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hal ini perlu diteliti tentang karakteristik Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan urgensi kedudukan hukum Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman yang independen.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatannya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus memiliki karakteristik yang berbeda signifikan dibandingkan dengan badan peradilan lain pada umumnya. Pengadilan Pajak seyogyanya ditempatkan berada di lingkungan peradilan tata usaha negara satu atap di bawah Mahkamah Agung,

Kata Kunci: Pengadilan Pajak; Kekuasaan Kehakiman; Independen

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan dan Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	6
1.3 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
a. Metode Pendekatan	6
b. Sumber Bahan Hukum	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.	9
d. Analisis Bahan Hukum	10
1.5 Kajian Teoritis	10
a. Definisi Peradilan Pajak	10
b. Teori Kewenangan	11
c. Teori Pembagian Kekuasaan	11
d. Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	12
e. Objektivitas Peradilan	15
f. Asas Objektivitas (Netral)	18
1.6 Sistematika Pertanggungjawaban	27

BAB II	KARAKTERISTIK PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN	29
2.1	Pengadilan Pajak di Indonesia	29
a.	Jalur Banding di Pengadilan Pajak	29
b.	Keputusan Pengadilan Pajak	33
2.2	Sengketa Pajak	34
a.	Pengertian Sengketa Pajak	34
b.	Penggolongan Sengketa Pajak	35
c.	Timbulnya Sengketa Pajak	35
d.	Waktu dan Tempat Penyelesaian Sengketa Pajak	37
e.	Berakhirnya Sengketa Pajak	38
2.3	Karakteristik Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus	39
a.	Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pengadilan Pajak	39
b.	Gambaran Umum Perkara dan Proses Penanganan Perkara	41
c.	Organisasi Pengadilan Pajak	53
d.	Kompatibilitas Pengadilan Pajak dengan Sistem Peradilan	56
BAB III	URGensi KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN	58
3.1	Urgensi Kedudukan Hukum Pengadilan Pajak	58
3.2	Kewenangan Pengadilan Pajak	66
3.3	Objektifitas Peradilan	66
3.4	Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	68
a.	Reposisi Pengadilan Pajak menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	70
b.	Pengadilan Pajak sebagai Sebuah Anomali dalam Kekuasaan Kehakiman	73

	c. Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Finansial	79
BAB IV	PENUTUP	81
	4.1 Kesimpulan	81
	4.2 Saran	81
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Peranan Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
	Tahun 2019-2024	2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Pemeriksaan Banding dengan Sidang Acara Biasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002	48
Gambar 2.2	Skema Struktur Organisasi Pengadilan Pajak	53